GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 20/12/2004**

Subyek : **Hari : Senin**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Terapkan Bahan Bakar tanpa Timbal 2005

JAKARTA (Media): Indonesia harus siap dengan Kesepakatan Euro 2 untuk menggunakan bahan bakar tanpa timbal pada 2005. Namun, kalangan otomotif belum siap dengan teknologi baru untuk menghadapi Euro 2 tersebut. Demikian dikatakan Ridwan Tamin, Asisten Deputi (Asdep) Emisi Kendaraan KLH dalam diskusi bertema *Penggunaan bensin tanpa timbal*, beberapa waktu lalu di Jakarta. Sesuai PP No 41/99 tentang pengendalian pencemaran udara, kata Ridwan, kendaraan bermotor tipe baru dan lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan.

"PP ini diperkuat dengan Kepmen LH No 141/2003 tentang ambang batas emisi kendaraan bermotor tipe baru yang sedang diproduksi. Standar Euro 2 akan berlaku 2005 dan Indonesia turut meratifikasinya," kata Ridwan. Konteks pelaksanaannya, lanjutnya, memang tidak lepas dari baku mutu, jenis kendaraan, laik jalan dan sebagainya. KLH mengurusi baku mutu dan lainnya ditangani Dephub. Jadi, kata Ridwan, sesuai dengan kesepakatan Euro 2, maka terhitung 1 Januari 2005 kendaraan roda 4 tipe baru dan yang sedang diproduksi harus menggunakan mesin empat tak. "Pihak otomotif yang terlanjur memproduksi kendaraan bermotor dua tak harus segera mengubahnya menjadi empat tak. "Secara keseluruhan pemberlakuan empat tak pada 2007."

Kebijakan tersebut, menurut Ridwan, harus melihat kenyataan ekonomi, masyarakat sosial Indonesia. "Tentu saja kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Masalah kualitas bahan bakar, teknologi dan harmonisasi regional harus diperhatikan. Kalangan industri otomotif pun, lanjutnya, harus bisa menyesuaikan dengan kesepakatan Euro 2. Ridwan menjelaskan Indonesia langsung menyepakati Euro 2 dengan alasan bisa mengurangi tingkat pencemaran udara dari 100 persen ke 20%. Dengan kata lain bobot pencemaran bisa dieliminasi, khususnya pada kendaraan bermotor. Oleh sebab itu penggunaan bahan bakar minyak tanpa timbal merupakan sebuah keharusan bagi kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam kesempatan sama Isnaeni dari Direktorat Pengolahan dan Niaga Migas Dirjen Minyak dan Gas Bumi menjelaskan sesuai UU No 22/2001, Ditjen Migas telah mempersiapkan bahan bakar minyak menghadapi Euro 2. "Saat ini bensin timbal sebanyak 9 juta kilo liter/tahun sedangkan bahan bakar nontimbal 3 juta kilo liter/tahun. Hanya Jabotabek, Cirebon, Batam dan Balikpapan saja yang menggunakan bensin tanpa timbal."

Kapasitas produksi minyak di Indonesia sebesar 1,057 barel di mana 75%-nya untuk kebutuhan dalam negeri. Pangsa pasar BBM terbesar pada solar mencapai 44%, sedangkan premium 42,11%. Dengan kondisi demikian, Ditjen Migas akan memberlakukan seluruh pasokan BBM dalam negeri di seluruh Indonesia tanpa timbal. "Masalahnya polusi di Jabotabek nanti tetap tinggi, karena lalu lintas kendaraan dari luar Jabotabek yang masih memakai timbal. Ini harus diatur segera. Pemerintah akan menjual bahan bakar tanpa timbal sesuai standar internasional pada November 2005." Sementara itu, Nurfairi mewakili Suroso selaku Direktur Pengolahan Pertamina menegaskan 2005 Pertamina siap memproduksi bensin tanpa timbal. Apabila selama ini masih ditemukan kandungan timbal 0,013 merupakan timbal berasal dari alam yang tidak bisa dihilangkan. Pada dasarnya Pertamina tidak memproduksi bensin bertimbal lagi. Ia menjelaskan sebetulnya *octane booster* (OB) nontimbal masih cukup bagus dibandingkan dengan pengganti timbal lainnya, seperti HOMC komponen gasolin beroktan tinggi, alkohol, dan sebagainya. Jenis OB nontimbal yang sudah dilakukan tes dan akan dipakai Pertamina yaitu *jeis manganese* dan *ferro base.*

Sebetulnya sesuai SK Menteri Pertambangan dan Energi No 1585K/32MPE/1999 menetapkan 1 Januari 1999 bensin yang dipasarkan di Indonesia tidak mengandung timbal. "Akan tetapi, belum ada komitmen jelas dari pemerintah mengenai penggunaan OB nontimbal ini." Sekarang ini, kata Nurfairi, kekhawatiran Pertamina adalah adanya BBM oplosan yang berdampak negatif pada produk Pertamina sendiri. Karena BBM oplosan mengandung timbal dan berbahaya bagi lingkungan. M Rudi Wahyono, anggota Pokja Clean Fuel Mitra Emisi Bersih melihat sikap pemerintah dalam hal ini KLH sifatnya memaksakan kehendak.

"Fakta di lapangan banyak kendaraan bermotor yang belum siap dengan BBM nontimbal karena teknologinya harus beli. Rata-rata orang Indonesia membeli mobil harganya di bawah Rp100 juta. Itu artinya mobil tersebut belum dilengkapi dengan teknologi bensin tanpa timbal." Apabila 2005 semua kendaraan wajib menggunakan mesin empat tak, menurut Rudi, seluruh mesin kendaraan bermotor harus mengalami perubahan. Dan itu tidak bisa cepat. Masyarakat juga terbentur persoalan ekonomi. Di samping itu, pemerintah juga terbentur produksi bensin tanpa timbal yang belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.

Rudi mengkritik sikap KLH yang langsung menandatangani kesepakatan Euro 2.

"Belum dari Euro 1, tapi loncat ke Euro 2. Kemungkinan nanti Indonesia ikut Euro 3 dan 4 supaya dianggap siap. Padahal sekarang pun menyongsong Euro 2005 belum sepenuhnya siap," kata Rudy.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP